

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PROGRAM STUDI	PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
MATA KULIAH	HUKUM PAJAK
JUMLAH SKS	2 SKS
TIM DOSEN	SYAMSUL HADI, SH., MH.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
2024**

Nomor Dokumen	UPNVJ/
Revisi	
Tanggal	

Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Ketua Tim Penyusun	Kajur/ Kaprodi	Wadek I
(Dr. Muthia Sakti, SH, MH)	(Abdul Kholiq, SH, MH)	(Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM)

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

VISI

Menjadi program studi hukum yang unggul, berkualitas Internasional, inovatif, berdaya saing, yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan beridentitas bela negara.

MISI

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, menguasai teori dan praktik di bidang hukum yang terintegrasi dengan teknologi informasi, berdaya saing, dan beridentitas bela negara.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang inovatif, berdaya saing dan unggul di bidang hukum ditingkat Internasional yang berintegrasi dengan teknologi informasi, serta beridentitas bela negara.
3. Membentuk sumber daya manusia yang beretika, bermoral dan berakhlak yang mulia.

TUJUAN

1. Menghasilkan Sarjana Hukum yang unggul, profesional di bidang ilmu hukum yang beridentitas bela negara.
2. Menghasilkan Sarjana Hukum yang mampu menerapkan ilmu hukum di lembaga industri, dunia usaha dan dunia industri, serta lembaga pemerintah dan non pemerintah.
3. Membentuk sumber daya manusia yang beretika, bermoral dan berakhlak yang mulia.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL TA 2023 / 2024				
Mata Kuliah Course/ Subject	Kode Code	Rumpun MK Group Course/ Subject	Bobot (sks) Credit	Semester Term	Tgl Penyusunan Date of Writing
HUKUM PAJAK	HKM 120659	Hukum Perdata	2	V	12 Januari 2024
Otorisasi Authorization	Nama Pengembang RPS Name of Developer Learning Plan		Koordinator Rumpun MK Coordinator of Group Course		Ka. Program Studi Head of Programme Study
	1. Syamsul Hadi, SH., MH		Dr. Muthia Sakti, SH, MH		Abdul Kholiq, SH, MH
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Expected Learning Outcomes (ELO)	CPL-Prodi yang dibebankan pada MK:				
	Sikap (S)	S2 – Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika S6 – Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan S7 – Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara S8 – Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.			

		S9 – menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
	Pengetahuan (P)	P1 – Menguasai konsep teoritik tentang: ciri, struktur, teori ilmu hukum, asas/ prinsip, norma hukum, dan sistem hukum nasional beserta perkembangannya. P2 – menguasai pengetahuan dasar tentang Sejarah dan aspek teoritis bidang hukum positif Indonesia. P3 – Menguasai prinsip, norma dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum.
	Ketrampilan Umum (KU)	KU1 – mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KU2 – Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
	Ketrampilan Khusus (KK)	KK2 – Mampu menganalisis teori hukum bidang tata negara, perdata, pidana, bisnis, dan hukum internasional secara integrative dengan ke-Indonesiaan dan kemanusiaan dengan pendekatan multidisipliner. KK8 – kemampuan mempraktikkan keterampilan komunikasi, berpikir kritis dan inovatif, literasi teknologi informasi, kolaborasi dan <i>teamwork</i> , <i>networking</i> , literasi finansial, respek terhadap sesama dan <i>long life learning</i> .
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):		
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Mata Kuliah Hukum Pajak, mahasiswa mampu: 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pengertian Hukum Pajak dan Sejarah Perkembangan Hukum Pajak di Indonesia; 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Fungsi dan Peranan Hukum Pajak; 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Perbedaan Hukum Pajak Materiil dan Formil; 4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Asas-asas Hukum Pajak di Indonesia; 5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Sistem Pemungutan Hukum Pajak; 6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Tarif Pajak dan Utang Pajak; 7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penagihan dan Pemeriksaan Pajak 8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Surat Ketetapan Pajak Sebagai Hasil Pemeriksaan Pajak; 9. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Surat Pemberitahuan Pelaporan PPN, PPh (pribadi dan badan hukum); 10. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Sejarah Lembaga Penyelesaian Sengketa Pajak;		
Kemampuan akhir diharapkan/ Sub-CPMK:		
1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pengertian Hukum Pajak dan Sejarah Perkembangan Hukum Pajak di Indonesia;		

	2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Fungsi dan Peranan Hukum Pajak; 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Perbedaan Hukum Pajak Materiil dan Formil; 4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Asas-asas Hukum Pajak di Indonesia; 5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Sistem Pemungutan Hukum Pajak; 6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Tarif Pajak dan Utang Pajak; 7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penagihan dan Pemeriksaan Pajak 8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Surat Ketetapan Pajak Sebagai Hasil Pemeriksaan Pajak; 9. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Surat Pemberitahuan Pelaporan PPN, PPh (pribadi dan badan hukum); 10. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Sejarah Lembaga Penyelesaian Sengketa Pajak; 11. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Sengketa Pajak dan Penyelesaiannya; Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pengadilan Pajak.
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini memberikan gambaran pada mahasiswa bagaimana pengaturan pajak di Indonesia, tujuan pemerintah mengenakan pajak kepada warga Negara serta apa landasan pemerintah dalam pengenaan pajak baik secara sosiologis, filosofis serta yuridis. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami sejarah dan perkembangan hukum pajak di Indonesia, prinsip-prinsip hukum pajak, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pelaksanaan undang-undang pajak serta penyelesaian sengketa baik terkait subjek dan objek pajaknya dalam kapasitasnya sebagai praktisi hukum, peneliti, akademisi maupun pejabat umum, juga implementasi keilmuan dalam bentuk produk-produk hukum berupa regulasi, akta otentik yang sesuai dengan undang-undang, kode etik serta peraturan lainnya yang terkait.
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pengertian Hukum Pajak dan Sejarah Perkembangan Hukum Pajak di Indonesia; 2. Fungsi dan Peranan Hukum Pajak; 3. Perbedaan Hukum Pajak Materiil dan Formil; 4. Asas-asas Hukum Pajak di Indonesia; 5. Sistem Pemungutan Hukum Pajak; 6. Tarif Pajak dan Hutang Pajak; 7. Penagihan Pajak; 8. Pemeriksaan Pajak; 9. Resiko Pajak; 10. Surat Ketetapan Pajak Sebagai Hasil Pemeriksaan Pajak; Buku Mustaqiem 11. Surat Pemberitahuan Pelaporan PPN, PPh (pribadi dan badan hukum); Buku Mustaqiem 12. Sejarah Lembaga Penyelesaian Sengketa Pajak; Mustaqiem BAB VII 13. Pengadilan, Sengketa Pajak dan Penyelesaiannya; Kebijakan Tax Amnesty: Kajian dalam Sistem Hukum (Substansi Hukum, Struktur Hukum & Budaya Hukum);
Pustaka	

	Utama: Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, <i>Asas-asas dan Dasar Perpajakan</i>, Bandung: Refika Aditama, 2010; H. Bohari, <i>Pengantar Hukum Pajak</i>, Jakarta: Rajawali Press, 2002; Alexander Thian, <i>Hukum Pajak</i>, Yogyakarta: Andi Publisher, 2021; Brotodihardjo, R. Santoso, <i>Penantar Ilmu Hukum Pajak</i>, Bandung: Refika Aditama, 2013; Adrian Sutedi, <i>Hukum Pajak</i>, Bandung: PT Bumi Aksara, 2022; M. Farouq S., <i>Hukum Pajak di Indonesia</i>, Jakarta: Prenadamedia, 2018; Catharina Vista Okta Frida, <i>Hukum Pajak di Indonesia</i>, Yogyakarta: Garudawacha, 2020; Y. Sri Pudyatmoko, <i>Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak</i>, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009; Pradhana Probo Seryardjo & Hadi Busono, <i>Efektivitas Penerimaan Pajak dan Permasalahan Sengketa Pajak</i>, Yogyakarta: Deepublish, 2022; Muhammad Djafar Saidi, <i>Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak</i>, Jakarta: Rajawali Press, 2008. Deddy Sutrisno, <i>Hakikat Sengketa Pajak</i>, Jakarta: Prenada Media, 2017; Iwan Erar Joesoef, <i>Teori Hukum: Dogma, Teori, Filsafat</i>, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021 Urgensi Peraturan Pajak https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3962 Pendukung: 1. Buku ajar yang terkait materi 2. Jurnal-jurnal yang terkait dengan materi 3. Video yang terkait dengan materi
Metode Pembelajaran	<i>Case Based Method</i>
Media Pembelajaran	1. LeAds 2. Google Classroom 3. Youtube
Tim Pengampu MK	Syamsul Hadi, SH, MH
Mata Kuliah Syarat	Hukum Perdata

Minggu / TM ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk dan Metode Pembelajaran, Penugasan	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Indikator	Kriteria dan Teknik			
1/ 16	Sub-CPMK 1 Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan sejarah perpajakan nasional	1. Ketepatan menganalisa dan memahami Sejarah Perpajakan Nasional: 2. Ketepatan menganalisa dan memahami Definisi Pajak 3. Ketepatan menganalisa dan memahami Sejarah Pengenaan Pajak 4. Ketepatan menganalisa dan memahami Pajak Masa Penjajahan Belanda 5. Ketepatan menganalisa dan memahami Pajak Masa Penjajahan Jepang 6. Ketepatan menganalisa dan memahami Pajak Masa Kemerdekaan 7. Ketepatan menganalisa dan memahami Masa	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) - Ceramah (Studi Kasus) - Diskusi - Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50'')] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60'')] Pembagian tugas kelompok untuk pelaksanaan <i>project</i> . LeAds: Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60'')] Mempelajari artikel ilmiah terkait.	Materi: Pengantar Mahasiswa belajar dan berdiskusi tentang ruang lingkup peradilan tata usaha	

		Modifikasi Hukum Pajak Nasional 8. Ketepatan menganalisa dan memahami Masa Reformasi Hukum Pajak Nasional 9. Ketepatan menganalisa dan memahami Desentralisasi Objek Pemungutan Pajak 10. Ketepatan menganalisa dan memahami Ciri-ciri Pajak				
2/16	Sub-CPMK 2 Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan landasan hukum pajak (teori, asas, filosofi)	1. Ketepatan menganalisa dan memahami Landasan Hukum Pajak (Teori, Asas, Filosofi): 2. Ketepatan menganalisa dan memahami Peran Negara 3. Ketepatan menganalisa dan memahami Pajak dan Teori Kontrak Sosial 4. Ketepatan menganalisa dan memahami Asas-asas Hukum Pajak 5. Ketepatan menganalisa dan memahami	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) (Gmeet) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")] Mahasiswa mengumpulkan tema, judul dan topik yang akan dibahas pada project kelompok.	Materi: 1. Penilaian terhadap proyek penugasan <i>mind mapping</i> versi mahasiswa 2. Penilaian keaktifan diskusi 3. Umpan balik	

		Landasan Filosofi Hukum Pajak 6. Ketepatan menganalisa dan memahami Manfaat Pajak		Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")]		
3/16	Sub-CPMK 3 Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan pelaksanaan hukum pajak (konsep, sistem, politik hukum)	1. Ketepatan menganalisa dan memahami Pelaksanaan Hukum Pajak (Konsep, Sistem, Politik Hukum): 2. Ketepatan menganalisa dan memahami Konsep Hukum Pajak Indonesia 3. Ketepatan menganalisa dan memahami Sistem Hukum Pajak Indonesia 4. Ketepatan menganalisa dan memahami Politik Hukum Pajak Indonesia 5. Ketepatan menganalisa dan memahami Teori Pemungutan Pajak di Indonesia 6. Ketepatan menganalisa dan memahami Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) (Gmeet) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Mahasiswa memberikan laporan pengerjaan project (terkait dengan jurnal tujuan). Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Kriteria: Rubrik Penilaian	Materi: 1. Penilaian terhadap proyek penugasan <i>resume</i> 2. Penilaian keaktifan diskusi 3. Umpan balik 4. Mahasiswa membaca artikel https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3962 5. dan berdiskusi tentang pelaksanaan hukum pajak (konsep, sistem, politik hukum)	

4/16	Sub-CPMK 4 Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan hukum pajak (pengertian, tugas, tujuan & fungsi, sistematika)	1. Ketepatan menganalisa dan memahami Hukum Pajak (Pengertian, Tugas, Tujuan & Fungsi, Sistematika): 2. Ketepatan menganalisa dan memahami Tugas Negara 3. Ketepatan menganalisa dan memahami Tata Kelola Negara 4. Ketepatan menganalisa dan memahami Kebijakan Negara 5. Ketepatan menganalisa dan memahami Unsur dan Klasifikasi Pajak 6. Ketepatan menganalisa dan memahami Hukum Pajak Materiil dan Formil 7. Ketepatan menganalisa dan memahami Sistematika Hukum Pajak 8. Ketepatan menganalisa dan memahami Sumber-sumber Hukum Pajak 9. Ketepatan menganalisa dan	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) (Gmeet) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50'')] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60'')] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60'')]	Materi : Mahasiswa belajar dan berdiskusi tentang hukum pajak (pengertian, tugas, tujuan & fungsi, sistematika)	
------	---	--	--	---	---	--

		memahami Subjek dan Objek Hukum Pajak 10. Ketepatan menganalisa dan memahami Asas-asas Hukum Pajak 11. Ketepatan menganalisa dan memahami Peristiwa Hukum Pajak 12. Ketepatan menganalisa dan memahami Hubungan Hukum Pajak 13. Ketepatan menganalisa dan memahami Hak dan Kewajiban serta tanggung jawab Hukum Pajak 14. Ketepatan menganalisa dan memahami Akibat Hukum Pajak 15. Ketepatan menganalisa dan memahami Lembaga-lembaga Hukum Pajak.				
5/16	Sub-CPMK 5 Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan hak dan kewajiban negara (Fiskus) dan wajib pajak	1. Hak dan Kewajiban Negara (Fiskus) dan Wajib Pajak: 2. Hak dan Kewajiban secara Umum	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) (Gmeet) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab	Materi : Mahasiswa belajar dan berdiskusi tentang hak dan kewajiban negara (Fiskus) dan wajib pajak	

		3. Hak dan Kewajiban secara Khusus		[PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]		
6/16	Sub-CPMK 6 Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan pemungutan pajak	1. Ketepatan mahasiswa dalam mendefinisikan Pemungutan Pajak: 2. Ketepatan mahasiswa dalam mendefinisikan Jenis-jenis pemungutan pajak 3. Ketepatan mahasiswa dalam mendefinisikan Sistem Pemungutan Pajak 4. Ketepatan mahasiswa dalam mendefinisikan Hambatan Pemungutan Pajak 5. Ketepatan mahasiswa dalam mendefinisikan	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	Materi : Mahasiswa belajar dan berdiskusi tentang pemungutan pajak, jenis-jenis dan hambatan pemungutan pajak	

		Antisipasi Penghindaran Pajak				
7/16	Sub-CPMK 7 Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan pajak terutang dan utang pajak	1. Ketepatan mahasiswa dalam memahami Pajak Terutang dan Utang Pajak: 2. Ketepatan mahasiswa dalam memahami Pengertian dan perbedaan 3. Ketepatan mahasiswa dalam memahami Unsur-unsur perhitungan utang pajak 4. Ketepatan mahasiswa dalam memahami Unsur dan Asas Hak Tanggungan 5. Ketepatan mahasiswa dalam memahami Timbulnya Utang Pajak 6. Ketepatan mahasiswa dalam memahami Sifat dan Kedudukan Utang Pajak 7. Ketepatan mahasiswa dalam memahami Hapusnya Utang Pajak	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	Materi: Mahasiswa belajar dan berdiskusi tentang pemungutan pajak, jenis-jenis dan hambatan pemungutan pajak	
8/16	UJIAN TENGAH SEMESTER					
9/16	Sub-CPMK 8	1. Ketepatan mahasiswa dalam	Kriteria:	Proses Belajar (PB)	Materi :	

	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan karakteristik hukum pajak	memahami Karakteristik Hukum Pajak: 2. Ketepatan mahasiswa dalam memahami Sebagai sistem yang bersifat terbuka 3. Ketepatan mahasiswa dalam memahami Sebagai sub-sistem Hukum Nasional 4. Ketepatan mahasiswa dalam memahami Sebagai Sistem antar hukum 5. Ketepatan mahasiswa dalam memahami Sebagai sarana hukum 6. Ketepatan mahasiswa dalam memahami Sebagai kompilasi keahlian multidisiplinair 7. Ketepatan mahasiswa dalam memahami Sebagai sistem hukum yang progresif dan dinamis 8. Ketepatan mahasiswa dalam memahami Sebagai pedoman hukum administrasi	Rubrik Penilaian	• Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	Mahasiswa belajar dan berdiskusi tentang karakteristik hukum pajak	
10/16	Sub-CPMK 9	Sumber dan Produk Hukum Pajak:	Kriteria:	Proses Belajar (PB)	Materi : 1. sumber dan produk	

	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan sumber dan produk hukum pajak	1. Ketepatan mahasiswa memahami Sumber dan Hirarkhis Hukum Pajak 2. Ketepatan mahasiswa memahami Produk-produk Hukum Perpajakan 3. Ketepatan mahasiswa memahami Redistribusi Tanah 4. Ketepatan mahasiswa memahami Peraturan Perpajakan 5. Ketepatan mahasiswa memahami Kebijakan Perpajakan 6. Ketepatan mahasiswa memahami Surat Ketetapan Pajak 7. Ketepatan mahasiswa memahami Surat Keputusan Pajak 8. Ketepatan mahasiswa memahami Putusan Pajak	Rubrik Penilaian	• Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	2. hukum pajak	
11/16	Sub-CPMK 10	Pajak dan Penerimaan Negara: 1. Ketepatan mahasiswa dalam	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi	Materi : 1. Pajak dan Penerimaan Negara	

	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan pajak dan penerimaan negara	mendefinisikan Keuangan Negara 2. Ketepatan mahasiswa dalam mendefinisikan Sumber dan Pendapatan/Penerimaan Negara 3. Ketepatan mahasiswa dalam mendefinisikan Penerimaan Negara 4. Ketepatan mahasiswa dalam mendefinisikan Pajak dan APBN 5. Ketepatan mahasiswa dalam mendefinisikan Fungsi Pajak		Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")]		
12/16	Sub-CPMK 11 Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan pengawasan hukum pajak	Pengawasan Hukum Pajak: 1. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan Pelaksanaan hak dan kewajiban pajak 2. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan Pengawasan Hukum Perpajakan 3. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan Pengawasan secara struktural petugas pajak	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) - Ceramah (Studi Kasus) - Diskusi - Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")]	Penugasan Terstruktur (PT)	Materi : 1. Pengawasan Hukum Pajak

		4. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan Penuntutan Petugas Pajak		[PT: 1 mg x (2 sks x 60")]		
13/16	Sub-CPMK 12 Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan penegakan hukum pajak	1. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan benda menurut hukum Islam 2. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan benda menurut hukum adat 3. Ketepatan mahasiswa dalam mendefinisikan benda menurut hukum perdata barat.	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) - Ceramah (Studi Kasus) - Diskusi - Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	Materi: Mahasiswa belajar dan berdiskusi tentang penegakan hukum pajak	
14/16	Sub-CPMK 13 Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan sengketa dan peradilan pajak	Sengketa dan Peradilan Pajak: 1. Sejarah Penyelesaian Sengketa 2. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan 3. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 4. Sengketa Perpajakan Jalur Mediasi dan Litigasi	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) - Ceramah (Studi Kasus) - Diskusi - Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM)	Materi Mahasiswa belajar dan berdiskusi tentang sengketa dan peradilan pajak	

		5. Pengadilan Pajak dan Fungsi Penegakan Hukum 6. Undang-undang Pengadilan Pajak 7. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pajak		[BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]		
15/16	Sub-CPMK 14 Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan metode dan teknik pemeriksaan pajak	Metode dan Teknik Pemeriksaan Pajak: 1. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan Metode 2. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan Teknis 3. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan Prosedur 4. Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan Studi Kasus Kebijakan Tax Amnesty: Kajian dalam Sistem Hukum (Substansi Hukum, Struktur Hukum & Budaya Hukum)	Kriteria: Rubrik Penilaian	Proses Belajar (PB) • Ceramah (Studi Kasus) • Diskusi • Tanya Jawab [PB: 1 mg x (2 sks x 50")] Kegiatan Mandiri (KM) [BM: 1 mg x (2 sks x 60")] Penugasan Terstruktur (PT) [PT: 1 mg x (2 sks x 60")]	Materi : Metode Dan Teknik Pemeriksaan Pajak	
16/16	UJIAN AKHIR SEMESTER					

Catatan:

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/ pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
3. **CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata Kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator Penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Teknik penilaian;** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-play & simulation, discovery learning, self-directed learning, corporative learning, collaborative learning, contextual learning, project-based learning*, dan metode lainnya yang setara.
10. **Materi pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.

11.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024

RANCANGAN TUGAS MAHASISWA

Mata Kuliah			
Kode Mata Kuliah		SKS:	Semester:
Dosen Pengampu			
Bentuk Tugas	Waktu Pengerjaan	Cara Pengerjaan	
Judul Tugas			
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah			
Deskripsi Tugas			
Metode Pengerjaan Tugas			
Bentuk dan Format Luaran			
Indikator, Kriteria dan Bobot Penilaian			
Jadwal Pelaksanaan Tugas			
Lain-Lain			
Daftar Rujukan			

MONITORING RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA
MATA KULIAH : HUKUM PAJAK
DOSEN KOORDINATOR : Syamsul Hadi, SH, MH
DOSEN PENGEMBANG RPS : Syamsul Hadi, SH, MH

No	Indikator	Kesesuaian	
		YA	TIDAK
1	2	3	4
1	Standarisasi format (sesuai SN DIKTI Pasal 12, dan kurikulum perencanaan proses pembelajaran terdapat 9 komponen minimal yang harus ada di dalam RPS) + 14 skill 4.0 yang terintegrasi dalam CPL dan dibuktikan dengan matriks korelasi skill 4.0 dengan CPL tertentu, diukur dalam RPS pada rubrik evaluasi hasil pembelajaran		
2	Pemutakhiran referensi (wajib mencantumkan hasil penelitian dan PkM serta publikasi lain dosen tetap)		
3	Penerapan model pembelajaran untuk capaian skills 4.0 (Permendikbud No.3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 11), <i>student center learning</i> menggunakan <i>Case Method</i> atau <i>Team Based Project</i>		
4	Rencana contoh kasus yang akan digunakan dalam tatap muka tertentu (format rancangan tugas mahasiswa, Penjelasan Pengisian Rencana Tugas Mahasiswa)		
5	Ketersediaan contoh kasus yg sesuai dengan dunia nyata (<i>real case</i>)		
6	Ketersediaan bahan untuk mendukung model pembelajaran		
7	Penggunaan dosen kelas besar/ dosen dari industri (S1: empat kali tatap muka) (D3 dan S2: dua kali tatap muka)		
8	Pembelajaran model <i>Asynchronous</i> dengan <i>Learning Management System - LEADs</i>		
9	Pembagian Tatap muka tiap pokok bahasan		

10	Ketersediaan hasil riset yang digunakan untuk kedalaman pokok bahasan		
----	---	--	--

*) isikan dengan tanda ceklis

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Syamsul Hadi, SH., MH	Dosen Koordinator Mata Kuliah	
2	Dr. Muthia Sakti, SH., MH.	Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi	
3	Abdul Kholiq, SH., MH.	Kepala Program Studi	



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

SILABUS SINGKAT

MATA KULIAH	Nama MK	Hukum Pajak
	Kode	
	Kredit	2
	Semester	IV

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini memberikan gambaran pada mahasiswa bagaimana pengaturan pajak di Indonesia, tujuan pemerintah mengenakan pajak kepada warga Negara serta apa landasan pemerintah dalam pengenaan pajak baik secara sosiologis, filosofis serta yuridis. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami sejarah dan perkembangan hukum pajak di Indonesia, prinsip-prinsip hukum pajak, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pelaksanaan undang-undang pajak serta penyelesaian sengketa baik terkait subjek dan objek pajaknya dalam kapasitasnya sebagai praktisi hukum, peneliti, akademisi maupun pejabat umum, juga implementasi keilmuan dalam bentuk produk-produk hukum berupa regulasi, akta otentik yang sesuai dengan undang-undang, kode etik serta peraturan lainnya yang terkait.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pengertian Hukum Pajak dan Sejarah Perkembangan Hukum Pajak di Indonesia;
2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Fungsi dan Peranan Hukum Pajak;
3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Perbedaan Hukum Pajak Materiil dan Formil;
4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Asas-asas Hukum Pajak di Indonesia;
5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Sistem Pemungutan Hukum Pajak;
6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Tarif Pajak dan Utang Pajak;
7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
8	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Surat Ketetapan Pajak Sebagai Hasil Pemeriksaan Pajak;
9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Surat Pemberitahuan Pelaporan PPN, PPh (pribadi dan badan hukum);
10	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Sejarah Lembaga Penyelesaian Sengketa Pajak;

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK)

1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pengertian Hukum Pajak dan Sejarah Perkembangan Hukum Pajak di Indonesia;
2	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Fungsi dan Peranan Hukum Pajak;

3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Perbedaan Hukum Pajak Materiil dan Formil;
4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Asas-asas Hukum Pajak di Indonesia;
5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Sistem Pemungutan Hukum Pajak;
6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Tarif Pajak dan Utang Pajak;
7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
8	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Surat Ketetapan Pajak Sebagai Hasil Pemeriksaan Pajak;
9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Surat Pemberitahuan Pelaporan PPN, PPh (pribadi dan badan hukum);
10	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Sejarah Lembaga Penyelesaian Sengketa Pajak;
11	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis Sengketa Pajak dan Penyelesaiannya;
12	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pengadilan Pajak.

MATERI PEMBELAJARAN

1	Pengertian Hukum Pajak dan Sejarah Perkembangan Hukum Pajak di Indonesia;
2	Fungsi dan Peranan Hukum Pajak;
3	Perbedaan Hukum Pajak Materiil dan Formil;
4	Asas-asas Hukum Pajak di Indonesia;
5	Sistem Pemungutan Hukum Pajak;
6	Tarif Pajak dan Hutang Pajak;
7	Penagihan Pajak;
8	Pemeriksaan Pajak;
9	Resiko Pajak;
10	Surat Ketetapan Pajak Sebagai Hasil Pemeriksaan Pajak; Buku Mustaqiem
11	Surat Pemberitahuan Pelaporan PPN, PPh (pribadi dan badan hukum); Buku Mustaqiem
12	Sejarah Lembaga Penyelesaian Sengketa Pajak; Mustaqiem BAB VII
13	Pengadilan, Sengketa Pajak dan Penyelesaiannya;
14	Kebijakan Tax Amnesty: Kajian dalam Sistem Hukum (Substansi Hukum, Struktur Hukum & Budaya Hukum);

PUSTAKA

1	Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, <i>Asas-asas dan Dasar Perpajakan</i> , Bandung: Refika Aditama, 2010;
2	H. Bohari, <i>Pengantar Hukum Pajak</i> , Jakarta: Rajawali Press, 2002;
3	Alexander Thian, <i>Hukum Pajak</i> , Yogyakarta: Andi Publisher, 2021;
4	Brotodihardjo, R. Santoso, <i>Penantar Ilmu Hukum Pajak</i> , Bandung: Refika Aditama, 2013;
5	Adrian Sutedi, <i>Hukum Pajak</i> , Bandung: PT Bumi Aksara, 2022;
6	M. Farouq S., <i>Hukum Pajak di Indonesia</i> , Jakarta: Prenadamedia, 2018;
7	Catharina Vista Okta Frida, <i>Hukum Pajak di Indonesia</i> , Yogyakarta: Garudawacha, 2020;
8	Y. Sri Pudyatmoko, <i>Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak</i> , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009;
9	Pradhana Probo Seryardjo & Hadi Busono, <i>Efektivitas Penerimaan Pajak dan Permasalahan Sengketa Pajak</i> , Yogyakarta: Deepublish, 2022;
10	Muhammad Djafar Saidi, <i>Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak</i> , Jakarta: Rajawali Press, 2008.
11	Deddy Sutrisno, <i>Hakikat Sengketa Pajak</i> , Jakarta: Prenada Media, 2017;
12	Iwan Erar Joesoef, <i>Teori Hukum: Dogma, Teori, Filsafat</i> , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021
13	Urgensi Peraturan Pajak https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3962
PRASYARAT	
Hukum Perdata	



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

RENCANA EVALUASI PEMBELAJARAN

MATA KULIAH	Nama MK	Hukum Pajak
	Kode	
	Kredit	2
	Semester	IV
	Dosen Pengampu	Syamsul Hadi , SH, MH
Bentuk Evaluasi		Deskripsi
Tugas Kelompok		Tugas kelompok berupa tugas makalah, membahas masing-masing tema yang kemudian dilakukan presentasi serta publikasi.
UTS		Mahasiswa diminta mengumpulkan informasi terkait suatu tema, sehingga dapat dikompilasi secara keseluruhan (1 kelas) terkait Hukum pajak dari beberapa daerah/ negara.
UAS		Mahasiswa berkelompok (masing-masing 2 orang) membuat artikel ilmiah berkaitan dengan analisa dari pajak suatu topik antara suatu suku/ daerah/ negara dengan suku/daerah/ negara lainnya. Disarankan untuk dapat melakukan publikasi.

Total Penilaian

No	Penilaian	Presentase
1	UTS	20%
2	UAS	35%
3	Tugas Makalah	30%
4	Partisipasi di kelas	15%
TOTAL		100%

GRADE	HURUF MUTU	SEBUTAN MUTU
40 – 54.99	D	Kurang
55 – 59.99	C	Cukup
60 – 64.99	C+	Lebih dari Cukup

65 – 69.99	B-	Cukup Baik
70 – 74.99	B	Baik
75 – 79.99	B+	Baik Sekali
80 – 84.99	A-	Sangat Baik
85 – 100	A	Dengan Pujian